

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Kasus Pada Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa
Sumber Rahayu Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI



**Nama : Mohamad Andrian Yudistira
NIM : 222014334**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Kasus Pada Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa
Sumber Rahayu Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sajana Ekonomi**



Nama : Mohamad Andrian Yudistira

NIM : 222014334

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

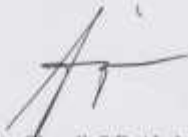
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam
Menciptakan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Desa
Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa Sumber
Rahayu Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim)
Nama : Mohamad Andrian Yudistira
NIM : 222014334
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing I

Pembimbing II



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN/NBM : 0228115802/1021961



(Lis Djuniar, S.E., M.Si)
NIDN/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui
Dekan

u. l. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri, S.E., M.Si., Ak.CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Andrian Yudistira

Nim : 222014334

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan



Mohamad Andrian Yudistira

ABSTRAK

Mohamad andrian yudistira/222014334/Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menciptakan *Good Governance* Di Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa Sumber Rahayu Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim/Akuntansi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengelolaan alokasi dana desa dalam menciptakan good governance di Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa Sumber Rahayu Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam menciptakan good governance di kabupaten muara enim. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada tiga desa di Kabupaten Muara Enim dalam menciptakan Good Governance dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. jumlah responden 60. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tiga desa di Kabupaten Muara Enim belum menerapkan prinsip Good Governance. Hal ini mengakibatkan ketiga desa tersebut mengalami permasalahan dari segi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menciptakan Good Governance

ABSTRACT

Mohamad Andrian Yudistira/222014334/Analysis Of The Village Funds Allocation Management In Creating *Good Governance* In Village Sugih Waras, Village Sugih Waras Barat And Village Sumber Rahayu In Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim/Akuntansi Sektor Publik

The formolation of this research is how the urban allocation of rural funds created good governance In Village Sugih Waras, Village Sugih Waras Barat And Village Sumber Rahayu In Kecamatan Rambang kabupaten muara enim. The purposeof this research is to know the appropriations of the village funds in creating good governance in the enim country. the kinds of research used in this study is a descriptive study.the study in done in three villages that are related to the kabupaten muara enim in creating good governance with an incorectly written, planning, execution, administration, reporting, responsibility the number of responders 60, the date used in this study is primary data and secondary data with an analitical data collection and questionnaires. The results of this study can be concluded that in the management of the villages allocations of villages three, the kabupaten muara enim have not applied the principlesg good governance. This led to these three villages having problems with their problems akuntability, transperency, partisipation

Keyword : *managing the appropriation of the village funds in creating good governance*

PRAKARTA



Allhamdulillahirabbil a'lamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahman dan hidayah – Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menciptakan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa Sumber Rahayu Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muaraa Enim)”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tersayang Ebak (Ahmad Junan) dan Umak (Ertini) serta saudara/i yang telah mendoakan, memberikan inspirasi, motivasi selama menjalankan kuliah dan dukungan agar tetap semangat selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbingan 1, Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,AK.,M.Si dan Pembimbing 2, Ibu Lis Djuniar, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Palembang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penulisan skripsi ini kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang , beserta Wakil Rektor dan staf yang bertugas.
2. Bapak Drs. H.Fauziah Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Wakil Dekan dan staf yang bertugas.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK.,M.Si selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program, Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dewi Puspa Sari, S.E.,M.Si selaku Pembimbing Akademik Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak/ibu Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
6. Bapak Kades Serta Staff pada ketiga desa yang telah banyak membantu dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 2019

Penulis.

Mohamad Andrian Yudistira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKARTA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori.....	16
1. Alokasi dana desa	16
2. Dana Desa.....	17
3. <i>Good Governance</i>	22

B.	Penelitian Sebelumnya	25
----	-----------------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	30
B.	Lokasi Penelitian	31
C.	Operasional Variabel	21
D.	Data Yang Diperlukan	32
E.	Metode Pengumpulan Data	33
F.	Analisis Data Dan Teknik Analisis	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	
1.	Sejarah Desa	37
2.	Visi dan Misi Desa	42
3.	Struktur Organisasi Desa	46
4.	Pembagian Tugas	48
5.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menciptakan Good Governance Di Tiga Desa Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim	52
6.	Tingkat Pengembalian Kuesioner	57
7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkatannya	58
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	
1.	Indikator Perencanaan	60
2.	Indikator Pelaksanaan	64
3.	Indikator Penatausahaan	67

4.	Indikator Pelaporan.....	70
5.	Indikator Petanggungjawaban	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
A.	Simpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Program Pemerintah Desa Sugih Waras 2017 8
Tabel I.2	Program Pemerintah Desa Sugih Waras Barat 2017..... 9
Tabel I.3	Program Pemerintah Desa Sumber Rahayu 2017..... 10
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya 28
Tabel III.1	Lokasi Penelitian 31
Tabel III.2	Operasionalisasi Variabel 32
Tabel IV.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner 58
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 58
Tabel IV.3	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 59
Tabel IV.4	Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 61
Tabel IV.5	Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Perencanaan 62
Tabel IV.6	Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Pelaksanaan..... 65
Tabel IV.7	Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Penatausahaan 68
Tabel IV.8	Hasil Tabulasi Kuesioner Pelaporan 71
Tabel IV.9	Program Desa Pada Bidang Masing-Masing..... 74
Tabel IV.10	Hasil Tabulasi Kuesioner Indikator Pertanggungjawaban..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Perangkat Desa Sugih Waras.....	46
Gambar IV.2	Struktur Perangkat Desa Sugih Waras Barat	47
Gambar IV.3	Struktur Perangkat Desa Sumber Rahayu.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota paling sedikit 10%. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur perdesaan, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Perkembangan desa. (Tabrani, 2018: 12)

Dana desa menurut pasal 1 ayat 2 UU No.60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 32).

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. PP No. 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 32-33)

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa alokasi dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara suatu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas akuntabilitas, partisipatif, transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016: 47).

Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *Governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam

pengelolaan Negara. *Political Governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2009: 17).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemenang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2009: 20).

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut secara langsung dan tidak langsung. (V. Wiratna, 2015: 29).

Transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dari ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai. (V. Wiratna, 2015: 28)

Karakteristik *good governance* Menurut *United Nations Development Programs* (UNDP) badan internasional yang bergerak dibidang dana khusus dibawah naungan PBB, meliputi :*Participation, rule of law, transparency, responsisveveness, consensus orientation, equity,efficiency and effectiveness, accountability, Strategic Vision*. Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money (economy, efficcieny, dan effectiveness)*. (Mardiasmo, 2009: 18)

Menciptakan *good governance* dalam pengelolaan dana desa meliputi perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul tranksaksi

penerimaan dan pengeluaran desa, penatausahaan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa , pelaporan dalam melaksanakan tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota , menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah des secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahu anggaran, pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pembinaan dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil wajib pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota, pemerintah desa membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran, Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Keadaan di dalam suatu desa tentunya sangat beragam atau bervariasi antara satu desa dengan desa yang lainnya. Beragam perbedaan diantaranya ada desa yang sangat potensial, ada juga memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang sangat kurang, ketersediaan Infrastruktur yang kurang memadai, tingkat pendapatan rendah, lokasi sangat jauh dari ibu kota Kabupaten atau Kecamatan, dan beragam karakteristik lainnya. Khususnya pembangunan fisik desa.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama

berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh perangkat desa (Sekretaris Desa, Bpd, Kepala Dusun) dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan dwi dan taufik (2014) bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dikecamatan umbulsari kabupaten jember.

Penelitian yang dilakukan masiyah kholmi (2016) bertujuan untuk mendiskripsikan akuntabilitas dan faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Penelitian yang dilakukan neny (2017) bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan di desa karagsari kecamatan sukodono

Kecamatan Rambang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah 193,24 km² Kecamatan Rambang terletak di daerah perbatasan dengan batas wilayah Kecamatan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rambang Kapak Tengah (Prabumulih), sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Lubai (Muara Enim), sebelah barat berbatasan dengan Rambang Dangku (Muara Enim), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rambang Kuang (Ogan Ilir) dan memiliki jumlah penduduk 22.937 dengan kepadatan penduduk 45 jiwa/km perlu diketahui Kecamatan Rambang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rambang Lubai yang disahkan dengan peraturan daerah nomer 14 tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 13 juni 2002, Pada saat diresmikan Kecamatan Rambang terdiri dari 12 desa, Berdasarkan survei pendahuluan melalui wawancara dengan ketiga Kepala Desa dalam hal ini ada yang diwakilkan oleh sekretaris desa yaitu Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat dan Desa Sumber Rahayu di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Keberagaman desa dapat dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, maupun sumber daya manusia (SDM) di daerah pedesaan tersebut. Desa Sugih Waras merupakan ibu kota dari Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dimana penduduknya merupakan warga asli Kabupaten Muara Enim, Desa Sugih Waras Barat adalah desa baru yang

berdekatan dengan Desa Sugih Waras yang melakukan pemekaran dengan Desa Sugih Waras yang disahkan pada tanggal 10 oktober 2010, Desa Sumber Rahayu adalah desa kolonialisasi dimana penduduknya merupakan pendatang (transmigrasi) dari Pulau Jawa hampir semua masyarakat yang ada merupakan warga pendatang baik dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Berikut daftar tabel program pemerintahan dari ketiga desa tersebut :

Tabel I.1
Program Pemerintahan Desa Sugih Waras
Tahun 2017

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		KET
	Bidang Program	Jenis Kegiatan	
1,	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	1. Pembayaran Tetap Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	T
		2. Tunjangan Bpd Dan Anggotanya	T
		3. Tunjangan Lpm Dan Anggotanya	T
		4. Operasional RT/RW	T
2.	Bidang Pembangunan Desa	1. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Dan Kebersihan Lingkungan	T
		2. Pembangunan Sarana Olahraga /Lapangan Futsal	T.T
		3. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Desa	T
		4. Siring Jalan / Drainase	T.T
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	1. Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	T
		2. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	T
		3. Pembinaan Kesenian Dan Budaya	T.T

Lanjutan Tabel I.1

4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	1. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat, Bpd & Lpm	T
		2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	T
		3. Kegiatan Peningkatan Kelompok Pemuda	T.T
		4. Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	T
		5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	T

Ket : T = Terlaksana

T.T = Tidak Terlaksana

Sumber : Laporan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Sugih Waras. 2019

Tabel I.2
Program Pemerintahan Desa Sugih Waras Barat
Tahun 2017

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		KET
	Bidang Program	Jenis Kegiatan	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	1. Pembayaran Tetap Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	T
		2. Tunjangan Bpd Dan Anggotanya	T
		3. Tunjangan LPM Dan Anggotanya	T
		4. Operasional RT/RW	T
2.	Bidang Pembangunan Desa	1. Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi Dan Kebersihan Lingkungan	T
		2. Pembangunan Lapangan Sepak Bola	T.T
		3. Siring Jalan / Drainase	T
		4. Perehapan Penerangan Lampu Jalan	T.T

Lanjutan Tabel I.2

3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	1. Kegiatan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban	T
		2. Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	T
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat, Bpd & Lpm	T
		2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	T
		3. Kegiatan Peningkatan Kelompok Pemuda	T.T
		4. Peningkatan Kelompok Pengrajin	T.T

Ket : T = Terlaksana

T.T = Tidak Terlaksana

Sumber : Laporan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Sugih Waras barat. 2019

Tabel I.3
Program Pemerintahan Desa Sumber Rahayu
Tahun 2017

No	Bidang dan Jenis Kegiatan		Ket
	Bidang Program	Jenis Kegiatan	
1,	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	1. Pembayaran Tetap Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat	T
		2. Tunjangan BPD, LPM Dan Anggotanya	T
		3. Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah	T.T
		4. Operasional Komputer Desa	T
		5. Pengelolaan Aset Desa	T
		6. Pengelolaan Keuangan Desa	T
		7. Langganan Koran Masuk Desa	T.T
		8. Asuransi Aparatur Pemerintah Desa Dan BPD	T

Lanjutan Tabel I.3

2.	Bidang Pembangunan Desa	1. Perbaikan Jalan Desa	T.T
		2. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendidikan	T
		3. Penghijauan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup	T
		4. Pembangunan Pengusaha Ekonomi Produktif	T
3.	Bidang Pembinaan Masyarakat	1. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	T.T
		2. Pembinaan kehidupan umat beragama	T
		3. Pendidikan Anak Usia Dini	T
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan Kepala Desa Dsn Perangkat Desa	T
		2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	T
		3. Pemberdayaan Posyandu, UP2K Dan BKB	T
		4. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif	T
		5. Pembinaan TP PKK 4 Pokja	T
		6. Operasi Warung Teknologi Desa Dan Jaringan Desa Online	T.T

Ket : T = Terlaksana
T.T = Tidak Terlaksana

Sumber : Laporan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Sumber Rahayu, 2019

Berdasarkan tabel di atas program pemerintah pada tiga desa tersebut ada yang terlaksana (T) dan ada yang tidak terlaksana (TT) dalam rencana kerja pemerintah tahun 2017. Program pemerintah desa sugih waras, program yang tidak terlaksana adalah program pembangunan sarana olahraga/lapangan futsal program ini tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan lahan datar dan kurangnya

koordinasi pemerintah dengan masyarakat, program pembangunan siring jalan/drainase pada saat melakukan wawancara dengan pemerintah desa program ini tidak terlaksana dikarenakan belum ditemukannya kesepakatan dengan masyarakat yang rumahnya masih banyak dekat dengan jalan sehingga pada saat pembangunan jalan/drainase akan mengambil sebagian lahan dari masyarakat. Program pembinaan kesenian dan budaya dan program kegiatan peningkatan kelompok pemuda, program tersebut tidak terlaksana dikarenakan masih kurangnya minat dari pemuda desa untuk melestarikan kebudayaannya sendiri dikarenakan tergerus oleh kemajuan teknologi dan pengaruh dari kebudayaan luar.

Program pemerintah desa sugih waras barat program yang tidak terlaksana adalah pembuatan lapangan sepak bola program ini tidak terlaksana dikarenakan masih sedikitnya lahan datar yang akan dijadikan lokasi pembangunan lapangan sepak bola. Program perehapan penerangan lampu jalan pada saat melakukan wawancara dengan pemerintahan desa sugih waras barat, tidak terlaksanya program tersebut dikarenakan adanya suatu anggaran yang tidak sesuai dengan realisasi. Program yang tidak terlaksana adalah program peningkatan kelompok pemuda dan peningkatan kelompok pengrajin program tersebut tidak terlaksana karena kurangnya peminat pemuda desa untuk melestarikan budaya sendiri dan keterbatasan sumber daya dalam mendukung kerajinan tangan.

Program pemerintah desa sumber rahayu program yang tidak terlaksana adalah penetapan dan penegasan batas wilayah pada saat survei wawancara

dengan pemerintahan desa tidak terlaksananya program ini dikarenakan masih ada sengketa dari pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan perbatasan desa, program langganan koran masuk desa program ini tidak terlaksana dimana seharusnya pemerintah memperhatikan program yang dibuat apakah bermanfaat bagi semua masyarakat atau tidak. Program perbaikan jalan desa program ini tidak terlaksana karena adanya anggaran suatu program yang dibuat tidak sesuai realisasi sehingga mengakibatkan adanya program yang tidak terlaksana. Program kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban tidak terlaksana dikarena berdasarkan catatan pemerintah desa masih banyaknya laporan pencurian dan kasus penipuan pada periode tahun 2017. Program operasi warung teknologi desa dan jaringan desa online program tersebut tidak terlaksana dikarenakan kurangnya evaluasi program tersebut dimana seharusnya pemerintah membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum tidak hanya memeningkan beberapa pihak saja. Berbagai program pemerintahan desa yang tidak terlaksana disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program pemerintahan tidak melibatkan masyarakat, kurang keterbukaan perangkat desa dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menciptakan *Good Governance* (Studi Kasus Pada Desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa Sumber Rahayu Di Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimanakah pengelolaan alokasi dana desa dalam menciptakan *good governance* (studi kasus pada desa sugih waras desa sugih waras barat dan desa sumber rahayu di kecamatan rambang kabupaten muara enim) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pengelolaan alokasi dana desa pada tiga desa di kecamatan rambang Kabupaten Muara Enim sudah menerapkan prinsip *good governance*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan alokasi dana desa dalam menciptakan *good governance*.

2. Bagi lokasi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bagi desa Sugih Waras, Desa Sugih Waras Barat Dan Desa Sumber Rahayu agar dapat menggunakan alokasi dana desa dengan lebih baik lagi dalam menciptakan *good governance*.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi baru dari ilmu analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam menciptakan *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Febri Arifiyanto Dan Taufik Kurrohman (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dikabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, (Online), Volume 2, Nomor 3, Tahun 2014 (<http://ejournal.upi.edu/index.php/6598> ,Diakses 1 November 2018)

H. A. Tabrani Rusyan (2018) *Membangun Keuangan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara

Holmi Masiyah (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*, (Online), Vol 07 No, 02, 2016 (<Http://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/Jibe/Article/View/3421/0> 2016 Diakses 1 November 2018)

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi

Misbahuddin Iqbal Hasan (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Yogyakarta: Bumi Aksara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 http://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_14091511382255f64f3e508f6.pdf. (diakses 12-11-2018)

[PP No. 60 Tahun 2014 Beserta PP No. 22 Tahun 2015 Dan PP No.8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.Pdf](http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2016/04/PP-No.-60-Tahun-2014-beserta-PP-No.-22-Tahun-2015-dan-PP-No.-8-Tahun-2016-tentang-Dana-Desa-yang-Bersumber-dari-APBN.pdf)<http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2016/04/PP-No.-60-Tahun-2014-beserta-PP-No.-22-Tahun-2015-dan-PP-No.-8-Tahun-2016-tentang-Dana-Desa-yang-Bersumber-dari-APBN.pdf>. (diakses 12-11-2018)

Sugiono (2015). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tri Indrianasari Neny (2017) Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono *STIE Widya Gama Lumajang*, (Online), Volume 1 Nomor 2, Tahun 2017 ([Http://Ejournal.Stiewidyagamalumajang.Ac.Id/Index.Php/Asset/Article/Download/28/22](http://Ejournal.Stiewidyagamalumajang.Ac.Id/Index.Php/Asset/Article/Download/28/22)) Diakses 1 November 2018

Undang –Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Bandung: Citra Umbara

V. Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

V. Wiratna Sujarweni (2015). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Yuliansyah dan Rusmianto (2016) *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba empat